



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2024–2025
KAMIS, 17 APRIL 2025**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Pada kesempatan ini, atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas di masa reses, pada daerah pemilihan masing-masing.

Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh Anggota DPR RI dan hadirin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua, akan menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan fitra kemanusiaan yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi kebahagiaan kita semua, dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di daerah masing-masing setelah 1 (*satu*) bulan berpuasa.

DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga rakyat Indonesia dapat dengan lancar dan aman dalam perjalanan mudik serta merayakan Idul Fitri pada tahun ini yang berjalan relatif aman dan kondusif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selama masa reses dan kita bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan bagaimana harapan rakyat pada negara agar dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera, tentram, dan sentosa.

Kebijakan Negara, yang dihasilkan oleh Pemerintah dan/atau DPR RI, diharapkan dapat melindungi rakyat secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya; kebijakan yang dapat memudahkan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan umum publik lainnya; kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi kerakyatan; dan kebijakan-kebijakan lainnya yang memberikan jalan bagi rakyat untuk mencapai hidup yang lebih baik.

Pada saat yang sama, kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang berkejolak, perang tarif perdagangan; konflik geopolitik yang masih tinggi; dan dinamika global lainnya, yang dapat berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya.

Hal-hal tersebut semakin membutuhkan Kebijakan Negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan.

DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya, akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa persidangan ini, DPR RI akan memprioritaskan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasan 8 (*delapan*)

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, terdiri dari:

- 3 (*tiga*) RUU Usul DPR RI;
- 3 (*tiga*) RUU Usul Pemerintah; dan
- 2 (*dua*) RUU Kumulatif Terbuka.

Selain sejumlah Rancangan Undang Undang tersebut di atas, terdapat 12 (*dua belas*) Rancangan Undang Undang yang sudah menjadi usul DPR RI dan akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I.

Dalam pembentukan Undang Undang, DPR RI bersama Pemerintah, harus sungguh-sungguh dalam memenuhi syarat-syarat formal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga Undang Undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Pada masa kini: keterbukaan informasi, transparansi, partisipasi publik, komunikasi publik, sosialisasi substansi Rancangan Undang-Undang, telah menjadi kebutuhan rakyat yang harus dapat diartikulasikan oleh DPR RI bersama Pemerintah, pada saat membentuk suatu Undang Undang. Sehingga Undang Undang

yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sah sebagai Undang-Undang untuk kepentingan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Kita saat ini dihadapkan pada Gejolak global yang tidak menentu, perang dagang (*trade war*) yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat beberapa waktu lalu, akan menciptakan berbagai dampak dan risiko, mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar terhadap Dollar Amerika, hingga risiko perlambatan perekonomian global.

Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri.

Berbagai kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat.

DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara.

Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu.

RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang disusun tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus menjadi alat pertahanan ekonomi di tengah tensi dan dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global yang terus bergerak dinamis.

RAPBN Tahun Anggaran 2026 harus menjadi perisai fiskal sekaligus motor transformasi yang berpihak pada rakyat, berpijak pada kemandirian ekonomi, dan tangguh menghadapi dinamika global.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan.

DPR RI, melalui komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, yang akan menjadi agenda dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

DPR RI juga memberi perhatian khusus pada posisi duta besar Indonesia untuk beberapa negara sahabat yang hingga saat ini belum terisi.

DPR RI melalui fungsi diplomasi akan berupaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarparlemen melalui serangkaian kegiatan bilateral dan multilateral.

Sebagai bentuk kerja sama bilateral, pada masa sidang kali ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi asing, antara lain dari Parlemen Polandia, Uzbekishtan, Malaysia, dan Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa.

DPR RI juga tengah bersiap untuk menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanir-rahim*, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan III DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 akan dimulai sejak hari ini, Kamis, 17 April 2025 sampai dengan Senin, 23 Juni 2025.

Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan III ini, dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterahkan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

Kepada Anggota Dewan yang Terhormat:

“SELAMAT BEKERJA MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Om shanti, shanti, shanti Om

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

➤ Rancangan Undang Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (*carry over*);
2. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (*carry over*);
3. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*carry over*);
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata (*carry over*);
5. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (*carry over*);
6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (*carry over*);
7. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*carry over*/RUU Kumulatif Terbuka); dan
8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary).

➤ **Rancangan Undang Undang yang akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I:**

1. RUU tentang Hukum Acara Pidana;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
4. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
5. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;
10. RUU tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;
11. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara; dan
12. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

1. Parliamentary Meeting on the Occasion of the Commission on the Status of Women (CSW) di New York, Amerika Serikat (11 Maret 2025);
2. 1st Global Conference of Women Parliamentarians di Meksiko (13-15 Maret 2025);
3. 150th IPU Assembly Meeting di Tashkent, Uzbekistan (5-9 April 2025);
4. Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Malaysia, 11-17 Maret 2025;
5. The 4th Meeting of the Coordinating Committee for Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) di Serawak, Malaysia (21-24 April 2025);

6. The 2nd Consultative Meeting of Young Parliamentarians of AIPA di Selangor, Malaysia (5-8 Mei 2025);
7. Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta, Indonesia (12-15 Mei 2025);
8. The 14th ASEAN-AIPA Leaders Interface during the ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia (26-29 Mei 2025);
9. Women Political Leaders (WPL) Summit, di Ankara, Turki (28-30 Mei 2025).